

EFEKTIFITAS BANTUAN SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI TENGAH PERLAMBATAN EKONOMI INDONESIA DENGAN PENDEKATAN NON-PARAMETRIK

Palupi Lindiasari S.¹, Aji Wahyu Ramadhani²

¹ Pengajar di Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia

² Mahasiswa Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia

Korespondensi Penulis: palupi.ls@ui.ac.id, aji.wahyu62@ui.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the relationship and influence of social assistance on the number of poor people in Indonesia. There is a control variable as a comparison, namely; the number of people who work alone and work as laborers, central government debt and economic growth. The research method uses a quantitative approach with non-parametric statistics with annual data (2007-2017) and elasticity is used to measure the amount of change in the number of poor people due to additional social assistance. Pearson Moment Product and Rank Spearman correlation test to examine the relationship of each variable (number of people who work alone and work as laborers, central government debt and economic growth) to the number of poverty in Indonesia. The results of non-parametric statistics show that there is a very strong relationship between social assistance (National Health Insurance-Benefit Beneficiary Recipients (JKN-PBI) and Prosperous Rice (Rastra), and strong (Family Hope Program (PKH)) for the number of poor people. negative indicates that social assistance can significantly reduce the amount of poverty, with the strongest impact being the PBI program. There is a strong relationship between debt and working as a laborer on the number of poor people. The slowdown in economic growth is proven to be unrelated to the number of poor people. the biggest decrease in the number of poor people is the JKN-PBI program (-0.16), Rastra (-0.15) and PKH (-0.06). The additional employment as laborers has the highest effectiveness level of -0,34. Government debt is needed to reduce the number of poor people by -0.16, which means that in the middle of declining oak On the other hand, the amount of poverty in Indonesia can be reduced through social assistance programs, the creation of jobs as laborers and government debt allocated to productive activities and economic activities that directly affect the poor and vulnerable to poverty.

Keywords: Social assistance programs, Economics growth, Debt, Poverty, Laborers, Effectiveness

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan dan pengaruh bantuan sosial terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Terdapat variabel kontrol sebagai pembanding yaitu; jumlah orang yang bekerja sendiri dan bekerja sebagai buruh, utang pemerintah pusat dan pertumbuhan ekonomi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan statistik non-parametrik, data tahunan (2007-2017) dan elastisitas digunakan untuk mengukur besaran perubahan jumlah penduduk miskin akibat tambahan bantuan sosial. Uji korelasi Pearson

Moment Product dan Rank Spearman untuk menguji hubungan masing-masing variabel (jumlah orang yang bekerja sendiri dan bekerja sebagai buruh, utang pemerintah pusat dan pertumbuhan ekonomi) terhadap jumlah kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang sangat kuat antara bantuan sosial (Jaminan Kesehatan Nasional-Penerima Bantuan Iuran (JKN-PBI) dan Beras Sejahtera (Rastra), dan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap jumlah penduduk miskin. Tanda negatif menunjukkan bantuan sosial dapat menurunkan jumlah kemiskinan secara signifikan, dengan dampak terkuat adalah program PBI. Terdapat hubungan kuat antara hutang dan bekerja sebagai buruh terhadap jumlah penduduk miskin. Perlambatan pertumbuhan ekonomi terbukti tidak berhubungan dengan jumlah penduduk miskin. Hasil perhitungan elastisitas menunjukkan efektifitas bantuan sosial terhadap penurunan jumlah penduduk miskin paling besar adalah program JKN-PBI (-0,16), Rastra (-0,15) dan PKH (-0,06). Tambahan lapangan kerja sebagai buruh memiliki tingkat efektifitas yang paling tinggi sebesar -0,34. Hutang pemerintah dibutuhkan untuk menekan jumlah penduduk miskin sebesar -0,16. Artinya, di tengah perlambatan ekonomi, jumlah kemiskinan di Indonesia dapat ditekan melalui program bantuan sosial, penciptaan lapangan kerja sebagai buruh dan hutang pemerintah dialokasikan untuk kegiatan produktif dan kegiatan ekonomi yang berdampak langsung kepada penduduk miskin dan rentan miskin.

Kata Kunci: Bantuan Sosial, Pertumbuhan ekonomi, Hutang, Kemiskinan, Buruh, Efektifitas

PENDAHULUAN

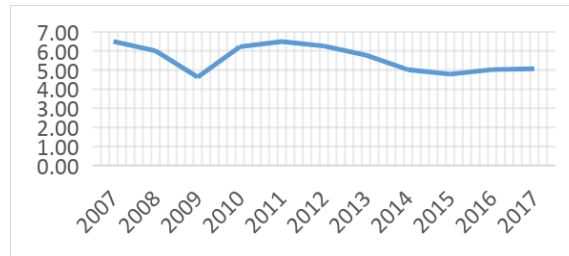
Upaya pengentasan kemiskinan secara makro ekonomi dapat dilakukan dengan menjaga pertumbuhan ekonomi tetap berada pada tingkat tinggi. Karena pertumbuhan ekonomi akan mendorong perekonomian dengan terciptanya lapangan kerja, sehingga pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi saja tidak akan cukup untuk memerangi kemiskinan, jika kebijakan lain tidak diberlakukan secara jelas dan nyata untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat (Tarabini, 2010)

Hal ini tercermin sejak krisis finansial melanda Amerika Serikat di tahun 2007-2008 telah merubah kondisi keuangan seluruh negara di dunia. Hal ini ditunjukkan dengan rentannya modal keluar (*capital-outflow*) dan resiko depresiasi nilai tukar yang makin tinggi. Dampaknya tingkat pertumbuhan ekonomi negara-negara rentan mengalami pelemahan. Begitupun dengan Indonesia, sejak tahun 2007 hingga 2017 tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan penurunan di tahun 2009 kemudian mulai mengalami perbaikan di tahun 2010 -2011. Namun setelah itu pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami perlambatan.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia juga dialami dinegara-negara lain di dunia baik negara maju maupun negara *emerging market* (BI, 2016). Hal ini

akibat era globalisasi ekonomi yang ditandai oleh liberalisasi keuangan dan barang, yang menyebabkan rentannya perekonomian suatu negara terhadap gejolak ekonomi negara lain.

Grafik 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Tahun 2007-2017)

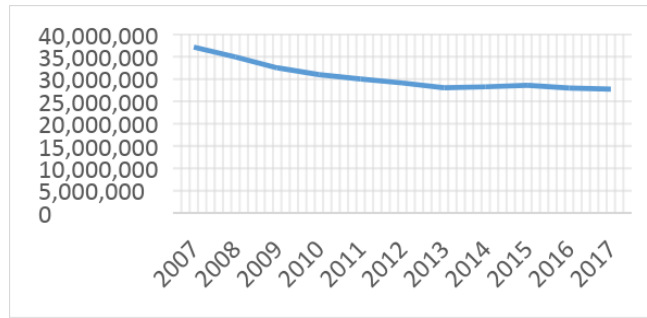


Sumber : (BPS, 2018)

Amerika Serikat yang merupakan negara adidaya dengan GDP terbesar di dunia hingga tahun 2017 mencapai USD19,754.1 billion (Bea, 2018) serta sekaligus menjadi importir terbesar. Maka tak heran jika Amerika menjadi tujuan ekspor potensial bagi setiap negara termasuk Indonesia. Oleh karenanya, gejolak ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat secara langsung akan berdampak pada kinerja ekonomi internasional Indonesia baik dari sisi perdagangan barang/ jasa maupun kinerja keuangan. Pada akhirnya akan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercermin dari perubahan pendapatan domestik bruto yang semakin menurun. Kondisi ini secara langsung menjelaskan dampak domestik melalui lemahnya daya beli masyarakat, khususnya rumahtangga miskin.

Pada saat terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi, kebijakan ekspansi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah gejolak ekonomi global tidak mampu mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia. Hal ini diindikasikan pada grafik searah antara pertumbuhan ekonomi dan jumlah kemiskinan, yakni pertumbuhan ekonomi yang mengalami perlambatan namun diikuti dengan penurunan jumlah kemiskinan. Artinya penurunan jumlah kemiskinan di Indonesia kemungkinan bukan berasal dari pertumbuhan ekonomi. Perlambatan ekonomi Indonesia memberikan tantangan tersendiri bagi upaya pengentasan kemiskinan. Dengan landasan tetap mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerintah melakukan upaya pemerataan ekonomi dengan tujuan menurunkan angka kemiskinan.

Grafik 2. Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)



Sumber : (BPS,2019)

Di tengah perlambatan ekonomi tersebut, jumlah penduduk miskin di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang menurun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk miskin berkurang dari tahun 2007 sebesar 37.168.300 jiwa menjadi 27.771.220 jiwa di tahun 2017. Terjadi penurunan laju kemiskinan rata-rata tiap tahunnya sebesar 0,59%. Hal ini merupakan keberhasilan pemerintah dalam menekan dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah kemiskinan di Indonesia. Salah satu faktor yang diduga kuat berkontribusi dalam menurunkan jumlah kemiskinan di Indonesia adalah adanya program bantuan sosial oleh pemerintah pusat.

Program bantuan sosial yang dimaksud terdiri dari program Rastra (beras sejahtera), JKN-PBI (Jaminan Kesehatan Nasional-Penerima Bantuan Iuran bersubsidi) dan PKH (Program keluarga harapan). Program pertama Beras Sejahtera (Rastra) merupakan program perlindungan sosial dari pemerintah kepada keluarga miskin yang ditujukan untuk melindungi kebutuhan pangan keluarga miskin. Hal ini dinilai cukup berhasil dalam menghadapi gejolak harga (inflasi) dari barang-barang kebutuhan pokok, khususnya beras (Septiadi D, 2016). Tidak hanya di Indonesia, gejolak harga beras berdampak negatif terhadap kemiskinan di Burkina Faso-Perancis (Fousseni, 2012). Kenaikan harga barang - barang secara umum dan terus-menerus akan menggerus daya beli masyarakat terutama masyarakat miskin, dan kondisi tersebut berpotensi menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk miskin. Sejumlah penelitian terkait di berbagai negara seperti (David M Cutler, 1991), (Powers, Growth and Poverty Revisited, 1995a) dan (Powers, Inflation, Unemployment and Revisited, 1995b) menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dan positif dari inflasi terhadap kemiskinan.

Dengan adanya bantuan beras sebagai bahan pokok utama masyarakat miskin, maka diharapkan saat terjadi gejolak harga beras dapat melindungi keluarga miskin dalam pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Program bantuan sosial selanjutnya JKN-PBI, ditujukan sebagai perlindungan dari pemerintah untuk kesehatan keluarga miskin. Hal ini dinilai cukup penting karena kesehatan membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan sulit terjangkau bagi keluarga miskin. Sehingga dengan adanya jaminan perlindungan kesehatan, keluarga miskin dapat menjaga kesehatan fisiknya dari penyakit tanpa harus membebani keuangan keluarga miskin tersebut (Tri, 2013).

Program bantuan sosial PKH (Program Keluarga Harapan) dicanangkan pada awal tahun 2007 merupakan program perlindungan sosial dari pemerintah yang mencakup tidak hanya kebutuhan pangan, namun juga perlindungan kesehatan dan pendidikan. Sistem yang diterapkan dalam program keluarga harapan menggunakan bantuan non- tunai bersyarat. PKH menjadi program pertama dan satu-satunya di Indonesia yang mengadopsi skema *Conditional Cash Transfer (CCT)* atau Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang sebelumnya dianggap berhasil memperbaiki permasalahan kemiskinan di negara- negara Amerika Latin, (Laura B Rawlings, 2005). Program bantuan social juga diterapkan dinegara-negara berkembang, Brasil telah berhasil menerapkan program bantuan social dengan menggabungkan antara bantuan tunai, bantuan transportasi tidak langsung dan dana bantuan tunai bersyarat tunggal (Bolsa Familia atau dana hibah keluarga). Kolombia dan Chile juga menerapkan program bantuan social bagi perlindungan social masyarakat dengan perluasan program dan sistem yang terintegrasi (Worldbank, 2017).

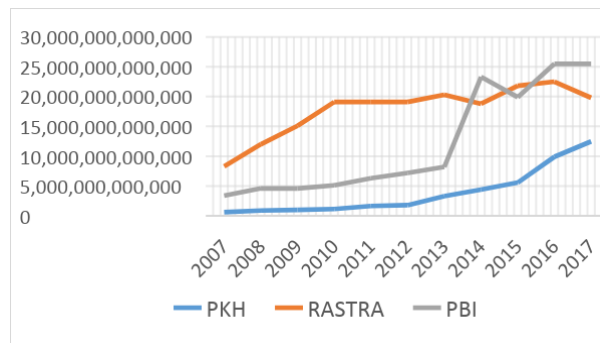
Berdasarkan data Susenas (2016) menunjukkan cakupan bantuan sosial Rastra menunjukkan program yang memiliki cakupan bantuan untuk masyarakat miskin paling luas dibanding program bantuan sosial lainnya. Program Rastra mencakup penduduk miskin hingga 70,4%, dan rentan miskin 64,2% sedangkan untuk program PBI dan PKH memiliki cakupan penduduk miskin yang tidak jauh berbeda, yaitu hanya mencakup penduduk miskin sebesar 30,4% dan 30,5%. Akan tetapi untuk cakupan penduduk rentan miskin, program PBI lebih besar 25,2% dibanding cakupan program PKH 12,60%.

Sejak tahun 2010, pemerintah Indonesia telah secara resmi menetapkan target pengentasan kemiskinan dan menekankan pentingnya sistem bantuan sosial yang berfungsi dengan baik dalam pengentasan kemiskinan yang terus berlanjut. Hal ini tercantum dalam

Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan pengentasan kemiskinan, klasterisasi program pengentasan kemiskinan didasarkan pada basis sasaran dari setiap program. Ada tiga klaster dengan klaster pertama menasar basis individu, keluarga, atau rumah tangga, klaster kedua menasar basis komunitas, dan klaster ketiga menasar basis Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Klasterisasi program-program pengentasan kemiskinan adalah bentuk strategi pemerintah agar seluruh program yang dijalankan bisa saling melengkapi dan mendukung tercapainya percepatan pengentasan kemiskinan.

Bantuan sosial merupakan wujud program ketahanan ekonomi bagi rumahtangga miskin dalam menghadapi guncangan baik dari sisi pangan, kesehatan, pendidikan maupun krisis ekonomi serta bencana alam. Artinya bantuan sosial ditujukan tidak hanya untuk mengentaskan kemiskinan, namun sekaligus sebagai program jaminan perlindungan dalam upaya meminimalisir kerentanan ekonomi rumahtangga miskin.

Grafik 3. Data Anggaran Pengeluaran Dana Bantuan Sosial



Sumber: (Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 2018)

Data belanja anggaran bantuan sosial mulai tahun 2007 hingga 2017 menunjukkan trend yang menaik. Anggaran bantuan sosial terbesar di tahun 2007 hingga 2013 didominasi oleh program Rastra (Beras Sejahtera). Namun ditahun 2014, jumlah anggaran bantuan sosial program JKN-PBI mengalami peningkatan lebih dari 2 kali anggaran tahun 2013. Ditahun yang sama anggaran Rastra mengalami penurunan sebesar kurang lebih 9% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dari permasalahan implementasi program Rastra seperti penetapan sasaran yang buruk, tergerusnya manfaat hingga beras yang hilang (*worldbank*, 2017). Anggaran program PKH menunjukkan peningkatan tiap tahunnya, walaupun jumlahnya masih dibawah anggaran program Rastra dan JKN-PBI. Hal ini cukup wajar, mengingat adanya

persyaratan yang diterapkan bagi penerima bantuan PKH. Sehingga tidak semua rumahtangga miskin dapat secara mudah mendapatkan bantuan tersebut.

Seperti telah diuraikan di atas bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan, namun jumlah kemiskinan menunjukkan penurunan. Dengan adanya bantuan sosial mengindikasikan sebagai faktor yang mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia. Namun, ditengah pertumbuhan ekonomi yang mengalami stagnasi, darimanakah pembiayaan bantuan sosial yang dikelola pemerintah. Salah satu faktor yang paling memungkinkan adalah sumber pembiayaan berasal dari hutang pemerintah. Hal ini dapat diindikasikan dari kecilnya jumlah anggaran bantuan sosial dari PDB sesuai hasil riset worldbank (2017), dimana jumlah anggaran bantuan sosial Indonesia hanya sebesar 0,7 persen dari PDB. Nilai tersebut lebih kecil dari negara berpenghasilan menengah ke bawah dengan porsi bantuan sosial sebesar 1,5 persen dari PDB. Sehingga terdapat indikasi adanya kontribusi hutang pemerintah terhadap kenaikan dana anggaran bantuan sosial.

Faktor lainnya yang dapat mendorong penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah penciptaan lapangan kerja, baik diciptakan sendiri atau bekerja sebagai buruh (tenaga kerja). Perlunya penciptaan lapangan kerja dalam menurunkan jumlah penduduk miskin dijelaskan melalui hasil penelitian (Ita Aristina, 2017). Hasil penelitian di propinsi Bali menunjukkan pengangguran sebagai faktor kebalikan dari penciptaan lapangan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di propinsi Bali. Artinya dibutuhkan penciptaan lapangan kerja bagi warga miskin untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dari pendapatan yang sifatnya rutin atau kontinue. Penelitian sebelumnya yang mengangkat permasalahan efektifitas bantuan sosial terhadap kemiskinan diantaranya (Harris, 2001), (Cord, 2007)), (Gertler, 2004), (P Gertler, 2005), (Schultz, 2004), (FV Soares, 2006), (Suharto, 2015) dan (A Suharyadi, 2015)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan dan pengaruh bantuan sosial, pertumbuhan ekonomi, jumlah orang yang bekerja sendiri, bekerja sebagai buruh dan hutang pemerintah terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Hal ini ditujukan untuk melihat efektifitas bantuan sosial dalam menekan jumlah penduduk miskin dibanding kebijakan pemerintah lainnya yakni pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja (khususnya untuk buruh). Manfaat penelitian ini sebagai bahan evaluasi bagi kebijakan pemerintah terkait

kondisi yang efektif bagi penyaluran dana bantuan sosial, dan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang analisis kebijakan publik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan statistik non-parametrik. Uji korelasi menggunakan Uji Pearson Product Moment dengan menggunakan alat statistik SPSS 23, dan pengukuran elastisitas untuk melihat respon perubahan jumlah kemiskinan akibat perubahan variabel eksogen. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data time series tahun 2007 hingga 2017. Berikut rumus pengujian Pearson Product Moment (Quadratullah, 2017) dan Rank Spearman (Spearman, 1904):

$$\text{Rumus Pearson Product Moment : } r = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}}$$

$$\text{Rumus Rank-Spearman : } r_s = \frac{\sum_{i=1}^n (R_{x_i} - \bar{R}_x)(R_{y_i} - \bar{R}_y)}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (R_{x_i} - \bar{R}_x)^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (R_{y_i} - \bar{R}_y)^2}}$$

dimana

r : Koefisien korelasi r pearson

r_s : Koefisien korelasi rank spearman

n : jumlah sampel (data)

x_i : Variabel bebas ke-i ($i= 1,2,\dots,7$),

(X_1 (JKN-PBI), X_2 (PKH), X_3 (Rastra), X_4 (Pertumbuhan Ekonomi), X_5 (Bekerja sendiri), X_6 (Buruh), dan X_7 (Hutang)

y : Jumlah penduduk miskin Nasional

Nilai besaran koefisien korelasi Pearson mengikuti klasifikasi tingkat korelasi sebagai berikut.

Tabel 1
Klasifikasi Koefisien Korelasi

Interval koefisien	Tingkat Hubungan
0,80 – 1,00	Sangat Kuat
0,60 – 0,799	Kuat
0,40 – 0,599	Cukup Kuat
0,20 – 0,399	Rendah
0,00 – 0,199	Sangat Rendah

Setelah didapatkan nilai koefisien korelasi, selanjutnya dilakukan pengukuran tingkat elastisitas dari perubahan nilai masing-masing variabel bebas (X_1 hingga X_7) terhadap perubahan variabel terikat (jumlah penduduk miskin (y)) dengan rumusan sebagai berikut :

$$E_{x_i y} = \frac{\Delta x_i}{x_i} \times \frac{y}{\Delta y}$$

dimana :

$E_{x_i y}$: koefisien elastisitas Jumlah penduduk miskin terhadap perubahan variabel x_i

Δx_i : perubahan variabel bebas ke-i (x_1 hingga x_7)

Δy : perubahan jumlah penduduk miskin

y : nilai awal jumlah penduduk miskin

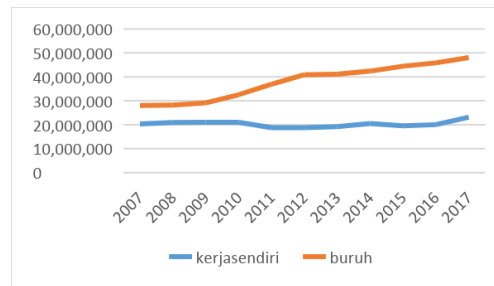
x_i : nilai awal variabel bebas ke-i (x_1 hingga x_7)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di tengah trend penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia, variabel lain yang menunjukkan peningkatan adalah jumlah orang bekerja sebagai buruh dan jumlah hutang pemerintah. Tingginya jumlah orang yang bekerja sebagai buruh ini sejalan dengan tingginya jumlah hutang pemerintah. Artinya ditengah perlambatan ekonomi yang melanda Indonesia, faktor pendorong lapangan kerja bersumber dari pembiayaan hutang pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah mampu mengoptimalkan kebijakan hutang secara produktif dan tepat sasaran. Data BPS berkaitan dengan status jumlah pekerja dari tahun 2007 hingga 2017 menunjukkan terdapat kenaikan yang cukup signifikan dalam jumlah pekerja sebagai buruh dibandingkan jumlah orang yang bekerja sendiri.

Laju jumlah orang yang bekerja sendiri cenderung menurun ini disebabkan oleh perlambatan ekonomi Indonesia sebagai dampak dari krisis finansial global yang melanda Amerika Serikat di tahun 2007. Artinya, di tengah kondisi krisis ekonomi tersebut, kecenderungan masyarakat memilih untuk bekerja sebagai buruh lebih tinggi dibanding bekerja sendiri.

Grafik 4
Data Mata Pencaharian dengan Kerja Sendiri dan Menjadi Buruh



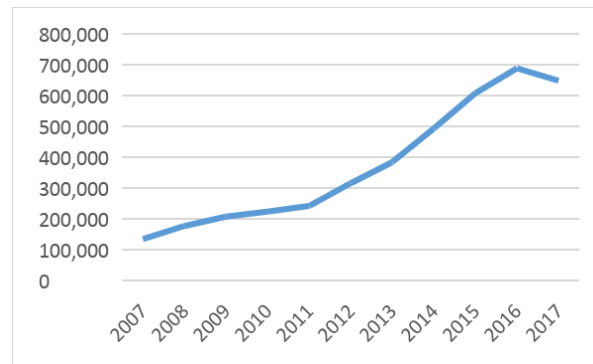
Sumber: BPS (2018)

Keputusan tersebut tentunya berkaitan dengan resiko usaha, dimana pilihan bekerja sendiri memiliki resiko finansial yang cukup tinggi dibanding pilihan bekerja menjadi buruh. Resiko yang dimaksud adalah kepastian pendapatan bagi pekerja sebagai buruh lebih terjamin dibanding pendapatan dari usaha sendiri. Dengan demikian orang yang bekerja sebagai buruh lebih mampu menghidupi kebutuhan rumahtangganya dibanding orang yang bekerja sendiri.

Meningkatnya jumlah orang bekerja sebagai buruh tidak lepas dari jumlah lapangan kerja yang meningkat. Namun ditengah perlambatan ekonomi ini, meningkatnya jumlah lapangan kerja tentu tidak bersumber dari laju pertumbuhan ekonomi. Artinya tidak bersumber dari peningkatan kegiatan ekonomi melalui kinerja domestik maupun internasional. Faktor yang memungkinkan terbukanya lapangan kerja ditengah perlambatan ekonomi adalah pembiayaan pembangunan melalui hutang pemerintah.

Data jumlah hutang pemerintah dari (Kemenkeu, 2017) menunjukkan trend yang cenderung meningkat tiap tahunnya. Laju hutang pemerintah mulai mengalami peningkatan yang cukup tinggi di tahun 2011 hingga 2016, selanjutnya memasuki tahun 2017 jumlah hutang pemerintah mengalami penurunan.

Grafik 5
Data Hutang Pemerintah



Sumber: data diolah dari Kemenkeu-RI (2017)

Berdasarkan trend jumlah hutang pemerintah tersebut dapat menjelaskan bahwa saat kondisi perekonomian terdampak krisis finansial global, maka hutang pemerintah dibutuhkan untuk menggerakkan perekonomian domestik. Namun disaat kondisi perekonomian cukup stabil, pemerintah cenderung mengurangi jumlah hutangnya untuk membiayai kebutuhan domestik.

Merujuk pada fenomena tersebut, maka dalam penelitian ini akan dibuktikan secara statistik hubungan antara jumlah penduduk miskin di Indonesia dengan kebijakan pemerintah melalui bantuan sosial, pertumbuhan ekonomi, jumlah orang yang bekerja sebagai buruh, bekerja sendiri dan hutang pemerintah. Sebelum menjawab tujuan penelitian tersebut, perlu dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu untuk menentukan jenis uji korelasi yang tepat.

Uji Normalitas, Linearitas dan Heterokedastisitas

Untuk menentukan jenis uji korelasi yang tepat diperlukan pengujian normalitas, linearitas dan heterokedastisitas terlebih dahulu. Jika syarat minimal normalitas dan heterokedastisitas dipenuhi oleh variabel independen, maka uji korelasi yang tepat adalah uji Pearson Product Moment. Sedangkan jika variabel independen tidak memenuhi syarat normalitas, maka uji korelasi dapat menggunakan uji Spearman-rho. Hasil pengujian ditunjukkan pada tabel 2.

Terdapat dua variabel independen yang tidak memenuhi syarat normalitas, namun memenuhi syarat linearitas dan homokedastisitas. Kedua variabel tersebut merupakan bantuan sosial PBI dan Rastra. Nilai uji linearitas ditunjukkan oleh nilai signifikansi statistik, yaitu untuk

PBI 0,03 dan Rastra 0,01. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai taraf nyata 5%, yang artinya variabel PBI dan Rastra terbukti signifikan berbentuk hubungan linear. Karena kedua variabel tidak memenuhi uji normalitas, maka untuk mengetahui hubungan antara PBI dan Rastra terhadap jumlah penduduk miskin adalah dengan melakukan uji Spearman-rho.

Tabel 2
Uji Normalitas, Linearitas dan Heterokedastisitas

Variabel	Kolmogorov Smirnov (Sig.)	Test of Linearity (Sig.)	Test Heterokedastisitas (Sig.)
1. Jumlah Penduduk miskin	0,170		
2. PBI		0,030	0,903
3. PKH	0,062		0,535
4. Rastra		0,010	0,508
5. Pertumb Ekonomi	0,103		0,365
6. Bekerja sendiri	0,200		0,995
7. Buruh	0,200		0,636
8. Hutang	0,200		0,446

Sumber : Data diolah dari Output SPSS (2019)

Sedangkan kelima variabel independen yang terdiri dari PKH, Pertumbuhan ekonomi, bekerja sendiri, bekerja sebagai buruh dan hutang terdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi hasil pengujian kolmogorov smirnov lebih besar dari taraf nyata (0,05) pada tabel 2. Artinya terima H_0 , yakni variabel-variabel independen tersebut terbukti secara statistik terdistribusi normal.

Variabel terikat dalam penelitian ini yakni jumlah penduduk miskin menunjukkan data yang terdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan berdasarkan hasil pengujian kolmogorov smirnov dengan signifikansi sebesar $0,170 > 0,05$. Artinya terima H_0 , dimana data jumlah penduduk miskin terdistribusi normal.

Berdasarkan hasil pengujian heterokedastisitas menunjukkan seluruh variabel dalam penelitian ini baik variabel independen maupun variabel terikat memiliki nilai signifikansi $> 0,05$. Artinya terima H_0 , yakni seluruh variabel dalam penelitian memiliki varian yang sama

(homokedastisitas). Dari 7 variabel eksogen, terdapat 5 variabel (PKH, Pertumbuhan ekonomi, bekerja sendiri, buruh dan hutang) yang memenuhi syarat normalitas dan homokedastisitas. Artinya kelima variabel eksogen tersebut dapat menggunakan uji korelasi Pearson Product Moment dalam melihat hubungannya terhadap jumlah penduduk miskin.

Uji Pearson Product Moment dan Uji Rank-Spearman

Terdapat dua pengujian korelasi atau hubungan antar variabel independen dengan variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini, yakni uji korelasi Pearson Product Moment dan Spearman-rho. Seperti telah dijelaskan diatas, variabel PBI dan Rastra akan di uji dengan Spearman-rho untuk mengetahui hubungannya dengan variabel jumlah penduduk miskin. Sedangkan lima variabel eksogen lainnya diuji dengan Pearson Product Moment untuk mengetahui hubungan tiap variabel tersebut dengan jumlah penduduk miskin.

Tabel 3
Hasil Uji Korelasi Pearson Product Moment dan Spearman-rho

Jumlah Penduduk Miskin (y)	Pearson Correlation	Sig (2-Tailed)	Spearman-rho	Sig (2-Tailed)
1. PBI			-0,968	0,000
2. PKH	-0,638	0,035		
3. Rastra			-0,817	0,002
4. Pertumbuhan Ekonomi	0,448	0,167		
5. Bekerja sendiri				
6. Buruh	0,109	0,751		
7. Hutang				
	-0,907	0,000		
	-0,787	0,004		

Sumber: Data diolah dari output SPSS (2019)

Hasil uji korelasi Spearman-rho antara variabel PBI dengan variabel Jumlah penduduk miskin menunjukkan nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari taraf nyata (toleransi error) sebesar 0,05. Artinya tolak H_0 , yakni terdapat hubungan signifikan antara PBI dengan jumlah penduduk miskin. Begitupun juga dengan uji korelasi antara Rastra

dengan Jumlah penduduk miskin, dimana nilai uji signifikansi Spearman-rho sebesar $0,002 < 0,05$. Artinya tolak H_0 , yakni terdapat hubungan signifikan antara Rastra dengan jumlah penduduk miskin.

Hasil uji korelasi Pearson Product Moment untuk variabel PKH terhadap jumlah penduduk miskin menunjukkan nilai signifikansi 0,035. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai taraf nyata 0,05, yang artinya tolak H_0 . Terdapat hubungan signifikan antara bantuan PKH terhadap jumlah penduduk miskin.

Uji korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan jumlah penduduk miskin ditunjukkan dengan nilai signifikansi uji Pearson Product Moment. Didapatkan nilai signifikansi sebesar $0,167 > 0,05$. Artinya terima H_0 , yakni tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dengan jumlah penduduk miskin. Hasil ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang membuktikan secara statistik tidak terdapat hubungan signifikan antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan (Sudarlan, 2015). Hubungan variabel jumlah orang bekerja sendiri dengan jumlah penduduk miskin ditunjukkan oleh nilai signifikansi uji korelasi sebesar 0,751. Nilai tersebut lebih besar dibanding taraf nyata (nilai toleransi error) 0,05. Artinya terima H_0 , yakni tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah orang bekerja sendiri dengan jumlah penduduk miskin.

Hasil uji korelasi Pearson Product Moment untuk variabel bekerja sebagai buruh dengan jumlah penduduk miskin menunjukkan nilai signifikansi 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari taraf nyata yang ditentukan sebesar 0,05. Artinya tolak H_0 , yakni terdapat hubungan signifikan antara jumlah orang bekerja sebagai buruh dengan jumlah penduduk miskin.

Kebijakan pemerintah melalui pembiayaan APBN melalui hutang memiliki hubungan dengan jumlah penduduk miskin. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi uji korelasi Pearson Product Moment sebesar $0,004 < 0,05$ (taraf nyata). Artinya tolak H_0 , yakni terdapat hubungan yang signifikan antara hutang pemerintah dengan jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan hasil uji korelasi tersebut menunjukkan terdapat lima variabel independen yang terbukti secara statistik memiliki hubungan dengan jumlah penduduk miskin, yakni bantuan sosial (PKH, Rastra dan PBI), jumlah orang bekerja sebagai buruh dan hutang pemerintah. Dan terdapat dua variabel secara statistik tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan jumlah penduduk miskin, yakni pertumbuhan ekonomi dan jumlah orang bekerja sendiri.

Variabel yang memiliki hubungan dengan jumlah penduduk miskin memiliki tingkat keeratan dan pengaruh yang berbeda-beda. Oleh karenanya, akan dibahas seberapa besar tingkat hubungan dan pengaruh antara variabel-variabel tersebut terhadap jumlah penduduk miskin.

Analisis Hubungan Bantuan Sosial terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Berdasarkan hasil pengujian korelasi antara bantuan sosial (PBI, Rastra dan PKH) dengan jumlah penduduk miskin menunjukkan pengaruh negatif. Artinya semakin tingginya anggaran pemerintah untuk bantuan sosial tersebut akan berdampak pada penurunan jumlah penduduk miskin. Akan tetapi hubungan masing-masing program bantuan tersebut berbeda-beda terhadap jumlah penduduk miskin.

Program bantuan sosial JKN-PBI memiliki hubungan negatif dan sangat kuat terhadap jumlah penduduk miskin. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi Spearman-rho sebesar -0,968. Artinya program JKN-PBI mampu berpengaruh secara signifikan dalam menekan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari tingginya jumlah anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk program JKN-PBI sejak tahun 2014. Hubungan sangat kuat juga terjadi antara program Rastra dengan jumlah penduduk miskin. Nilai koefisien korelasi Spearman-rho sebesar -0,817. Artinya program Rastra mampu menekan jumlah penduduk miskin.

Program bantuan sosial PKH memiliki hubungan negatif dan kuat terhadap jumlah penduduk miskin. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi Pearson Product Moment sebesar -0,638. Dari ketiga program bantuan sosial tersebut, program PBI memiliki hubungan yang sangat kuat dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Hal ini dapat diartikan program PBI mampu menjangkau secara luas penduduk miskin dan rentan yang membutuhkan bantuan secara langsung khususnya kesehatan. Para penerima bantuan iuran merasakan manfaat yang sangat besar karena manfaat jaminan kesehatan yang diberikan hampir tidak terbatas (worldbank, 2017). Penelitian (Wu, 2018) mendukung hasil penelitian tersebut, dimana secara statistik terbukti jika bantuan sosial berdampak terhadap penurunan kemiskinan. Artinya bantuan sosial merupakan salah satu instrument kebijakan pemerintah yang dapat digunakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Analisis Hubungan Jumlah Orang Bekerja Sendiri terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Hasil pengujian korelasi Pearson antara jumlah orang bekerja sendiri dengan jumlah penduduk miskin menunjukkan hubungan positif sebesar 0,109. Nilai tersebut termasuk dalam kategori hubungan yang sangat rendah. Artinya tidak ada korelasi yang signifikan antara jumlah orang yang bekerja sendiri dengan jumlah penduduk miskin. Hal ini juga mengindikasikan pilihan rumahtangga miskin untuk keluar dari kemiskinan tidak mampu dengan upaya bekerja sendiri. Karena resiko ketidakpastian pendapatan dari bekerja sendiri cukup tinggi dibanding jika rumahtangga miskin mendapat bantuan social dari program pemerintah. Resiko tinggi itulah yang justru berdampak buruk terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin. Hal ini dapat terjadi walaupun dalam penelitian ini didapatkan hasil yang tidak signifikan.

Analisis Hubungan Jumlah Orang Bekerja Sebagai Buruh terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Terdapat hubungan sangat kuat antara jumlah orang bekerja sebagai buruh terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Hal ini ditunjukkan oleh hasil statistic uji korelasi Pearson Product Moment dengan koefisien korelasi sebesar -0,907. Artinya upaya pemerintah dalam membuka lapangan kerja bagi penduduk miskin melalui jenis pekerjaan buruh telah mampu menekan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Kecenderungan menurunnya jumlah penduduk miskin ini mengindikasikan bahwa dengan adanya kepastian pendapatan yang diterima penduduk miskin setiap periodenya, akan berdampak pada stabilitas keuangan rumahtangga miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Berdasarkan hasil statistik tersebut, implikasi kebijakan bagi pemerintah yakni kebijakan ekonomi yang mampu mendorong pembukaan lapangan kerja yang sesuai kemampuan dan keahlian dari penduduk miskin. Jenis pekerjaan yang paling relevan adalah buruh. Jenis pekerjaan ini tidak membutuhkan skill yang tinggi serta membuka peluang besar bagi terserapnya penduduk miskin di pasar tenaga kerja. Penciptaan lapangan kerja dapat dilakukan pemerintah ditengah perlambatan ekonomi dunia melalui hutang luar negeri. Hal ini dijelaskan oleh hasil penelitian Syaparuddin dan Dahmiri (2010). Artinya dalam upaya penanggulangan kemiskinan, tidak hanya bersumber dari kebijakan bantuan sosial pemerintah yang bersifat

sementara, namun perlu upaya dari dalam diri masyarakat untuk merubah hidupnya melalui bekerja.

Analisis Hubungan Hutang Pemerintah terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Hasil statistik uji korelasi Pearson Product Moment menunjukkan terdapat hubungan signifikan antara hutang pemerintah terhadap jumlah penduduk miskin. Nilai koefisien korelasi sebesar $-0,787$ memberi arti terdapat hubungan kuat, dimana saat hutang pemerintah ditingkatkan dan dialokasikan untuk peningkatan anggaran dana bantuan social akan berdampak menurunkan jumlah penduduk miskin secara signifikan. Sebaliknya jika penggunaan hutang pemerintah tidak tepat sasaran, maka akan berdampak buruk dalam meningkatkan jumlah penduduk miskin.

Hasil tersebut didukung oleh penelitian sebelumnya dari (Dahmiri, 2010) yang menunjukkan hutang luar negeri pemerintah berpengaruh tidak langsung terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia. Pengaruhnya melalui investasi dan dan penciptaan lapangan kerja. Berdasarkan kedua hasil penelitian tersebut, menggambarkan bahwa penggunaan atau pemanfaatan dana yang bersumber dari pembiayaan hutang haruslah digunakan seoptimal mungkin dan tepat guna, baik sebagai sumber pendanaan bantuan social maupun untuk pembangunan dalam rangka penciptaan lapangan kerja. Namun, terdapat hasil yang bertentangan dari (Sherbaz, 2016) yang menunjukkan hutang menyebabkan peningkatan kemiskinan di Pakistan. Hal ini tentunya dapat terjadi saat pemanfaatan hutang pemerintah dialokasikan tidak tepat sasaran dan bersifat kontraproduktif. Hasil penelitian tersebut hendaknya menjadi masukan dikemudian hari berkaitan dengan besaran pembiayaan bantuan sosial melalui hutang yang aman sebagai indicator *early warning system*.

Analisis Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Nilai koefisien dari uji korelasi Pearson Product Moment senilai $0,448$. Namun secara statistic Nilai positif menunjukkan terdapat hubungan positif dan cukup kuat antara tingkat pertumbuhan ekonomi dengan jumlah penduduk miskin. Artinya semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia maka akan mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin. Akan tetapi, nilai koefisien tersebut tidak signifikan pada taraf nyata $0,05$. Sehingga tidak cukup bukti secara statistic terdapat hubungan cukup kuat antara tingkat pertumbuhan ekonomi dengan

jumlah penduduk miskin di Indonesia. Tidak signifikan hubungan dan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin diakibatkan oleh laju peningkatan pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini yakni sejak 2007 hingga 2017 menunjukkan trend perlambatan ekonomi. Hal ini mengindikasikan tidak cukup kuatnya pengaruh pertumbuhan ekonomi dalam menekan jumlah penduduk miskin.

Hasil tersebut didukung dengan penelitian worldbank (2017) yang menyebutkan bahwa dibutuhkan percepatan pertumbuhan ekonomi sebesar 8-9 persen per tahun selama 15 tahun mendatang yang bersifat inklusif dan pro terhadap masyarakat miskin dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih dikisaran 5-5,5 persen per tahun. Angka tersebut pun terbilang cukup baik dalam kondisi perekonomian global yang tidak menentu. Hasil penelitian lain yang mendukung hasil penelitian ini adalah (Wahyudi & Tri, 2013) yang menyatakan pertumbuhan ekonomi tidak berdampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Dari beberapa hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan ekonomi pro pertumbuhan ekonomi belum mampu menjawab tantangan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap efektifitas kebijakan pertumbuhan ekonomi yang dilakukan selama ini terhadap kemiskinan di Indonesia.

Analisis Elastisitas Jumlah Penduduk Miskin

Tingkat elastisitas digunakan untuk mengukur seberapa besar respon atau pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam hal ini variabel independen yang dimaksud sesuai hasil uji korelasi Pearson Product Moment dan Spearman-rho yang terbukti signifikan secara statistik. Variabel tersebut terdiri dari: bantuan sosial PKH, JKN-PBI dan Rastra, jumlah orang bekerja sebagai buruh, dan jumlah hutang pemerintah. Kelima variabel tersebut akan dihitung nilai perubahan tiap tahunnya mulai tahun 2007 hingga 2017. Masing-masing perubahan tersebut akan menjadi rasio pembagi dari perubahan jumlah penduduk miskin tiap tahunnya untuk mendapatkan nilai elastisitas jumlah penduduk miskin.

Tabel 4 menunjukkan hasil perhitungan elastisitas jumlah penduduk miskin berdasarkan variabel independen yang mempengaruhinya. Selanjutnya dihitung nilai median elastisitas jumlah penduduk miskin tersebut untuk menentukan ukuran pemusatan data atau parameter populasi dari tahun 2007 hingga 2017. Nilai elastisitas jumlah penduduk miskin juga

menunjukkan tingkat kepekaan (perubahan) jumlah penduduk miskin terhadap perubahan variabel independen tersebut.

Tabel 4. Elastisitas Jumlah Penduduk Miskin

Tahun	Elastisitas Jumlah Penduduk Miskin				
	EPKH	ERastra	EPBI	Eburuh	Ehutang
2007					
2008	-0.14	-0.13	-0.17	-11.77	-0.19
2009	-0.58	-0.27		-2.11	-0.40
2010	-0.30	-0.17	-0.40	-0.40	-0.61
2011	-0.07		-0.14	-0.24	-0.39
2012	-0.34		-0.21	-0.28	-0.10
2013	-0.04	-0.58	-0.26	-5.86	-0.17
2014	0.02	-0.10	0.00	0.25	0.03
2015	0.04	0.07	-0.08	0.23	0.05
2016	-0.03	-0.64	-0.07	-0.66	-0.15
2017	-0.03	0.07		-0.17	0.14
Median	-0.06	-0.15	-0.16	-0.34	-0.16

Sumber : data diolah (2019)

Keterangan tabel: simbol E menunjukkan elastisitas tambahan bantuan PKH, Rastra, PBI, tambahan jumlah orang bekerja sebagai buruh, dan tambahan hutang terhadap perubahan jumlah penduduk miskin

Elastisitas Jumlah penduduk miskin yang disebabkan oleh perubahan anggaran dana bantuan social (bansos) PKH menunjukkan nilai median elastisitas sebesar -0,06. Nilai koefisien elastisitas tersebut dapat menjelaskan sepanjang tahun 2007 hingga 2017, kenaikan dana bansos PKH sebesar 1 persen hanya mampu mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar 0,06%. Dalam hal ini nilai perubahan anggaran dana bansos PKH lebih besar dibandingkan perubahan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Oleh karena itu, tingkat elastisitas jumlah penduduk miskin dari dana bansos PKH termasuk kategori inelastic. Artinya dibutuhkan tambahan jumlah anggaran dana bansos PKH dalam jumlah yang sangat besar untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia. Artinya jika target pengentasan kemiskinan dari program PKH adalah 6%, maka dibutuhkan tambahan dana bansos PKH hingga 100% atau dua kali lipat dari nilai anggaran sebelumnya. Tingkat elastisitas jumlah penduduk miskin terhadap program PKH ini merupakan tingkat elastisitas terkecil dibanding jenis bansos lainnya (Rastra dan PBI). Hal ini cukup wajar mengingat pada kenyataannya anggaran dana bansos untuk program PKH jauh dibawah program JKN-PBI dan Rastra. Data terakhir tahun 2017 menunjukkan

terdapat selisih perbedaan anggaran dana program PKH dengan Rastra sebesar 7,3 triliun rupiah. Dan selisih perbedaan anggaran dana program PKH dengan JKN-PBI sebesar lebih dari 13 triliun rupiah. Artinya anggaran dana program JKN-PBI kurang lebih dua kali lipat dari anggaran dana program PKH.

Nilai elastisitas jumlah penduduk miskin yang disebabkan oleh perubahan dana anggaran bansos Rastra ditunjukkan dengan nilai median elastisitas sebesar -0,15. Artinya sepanjang tahun 2007 hingga 2017 perubahan dana bansos Rastra sebesar 1% mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 0,15%. Penurunan jumlah penduduk miskin nilainya lebih kecil dibanding tambahan jumlah dana bansos Rastra yang harus dikeluarkan pemerintah. Hal ini berarti respon perubahan jumlah penduduk miskin terhadap tambahan dana bansos Rastra termasuk kurang peka atau inelastic. Dengan demikian, dibutuhkan tambahan dana anggaran bansos Rastra yang cukup besar untuk menurunkan jumlah penduduk miskin dalam jumlah yang signifikan. Jika target pengentasan kemiskinan dari program Rastra sebesar 15%, maka dibutuhkan tambahan anggaran dana bansos Rastra sebesar 100% dari jumlah anggaran sebelumnya.

Namun tidak semata-mata tambahan anggaran bansos Rastra langsung berpengaruh terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Karena terdapat beberapa factor operasional yang harus diperbaiki seperti penetapan sasaran yang buruk, tergerusnya manfaat dan beras yang hilang. Hal ini merupakan permasalahan umum yang sering terjadi pada pelaksanaan program Rastra (*worldbank*, 2017).

Penurunan jumlah penduduk miskin melalui program JKN-PBI menunjukkan nilai yang paling tinggi dibanding program Rastra dan PKH. Hal ini ditunjukkan dengan nilai median elastisitas jumlah penduduk miskin sebesar -0,16, artinya perubahan dana bansos JKN-PBI sebesar 1% mampu menurunkan jumlah penduduk miskin hingga 0,16%. Nilai koefisien elastisitas ini lebih besar 0,01% dibanding nilai koefisien elastisitas jumlah penduduk miskin dari program Rastra. Artinya keduanya termasuk dalam kategori inelastic atau pengaruh perubahan jumlah dana bansos Rastra maupun JKN-PBI kurang cepat direspon oleh perubahan jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Hasil tersebut mengindikasikan terdapat kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan bantuan social dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Oleh karenanya sejak tahun 2015 pemerintah secara aktif memperbaiki

penyelenggaraan sistem jaminan social. Hal ini tercantum dalam Peraturan Presiden No 15 tahun 2015 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi pemerintah dalam upaya menjalankan program jaminan social melalui bantuan social, diantaranya : program-program perlindungan social kurang efisien dan efektif, terdapat banyak kasus dimana penduduk miskin dan rentan miskin tidak memperoleh perlindungan yang komprehensif dan selama empat tahun terakhir penurunan jumlah penduduk miskin hanya mencapai 0,29% per tahun . Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah melalui SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu) mulai membenahi sistem layanan social menjadi satu pintu. SLRT berfungsi dalam integrasi data, identifikasi keluhan dan rujukan serta penanganannya, pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program, serta pemutakhiran data secara dinamis dengan perangkat teknologi SIKS-NG (Kemensos, 2018).

Dengan adanya SLRT diharapkan permasalahan penyelenggaraan program perlindungan sosial dapat diatasi secara tepat dan dapat memperluas cakupan program bagi penduduk miskin dan rentan miskin yang belum teridentifikasi. Artinya merujuk pada hasil penelitian dan kebijakan pemerintah tersebut menunjukkan kontribusi program bantuan social berdampak signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Namun karena respon penurunan jumlah penduduk miskin tidak secepat besarnya dana bantuan social yang disalurkan pemerintah, maka perlu perbaikan sistem secara operasional melalui SLRT agar bantuan social melalui beberapa program perlindungan social tersebut dapat segera dirasakan manfaatnya bagi penduduk miskin dan rentan miskin.

Elastisitas jumlah penduduk miskin terhadap perubahan jumlah orang yang bekerja sebagai buruh menunjukkan nilai median elastisitas sebesar -0,34. Nilai tersebut merupakan tertinggi dibanding ketiga program bantuan social di atas (PKH, JKN-PBI dan Rastra). Artinya penambahan jumlah pekerjaan sebagai buruh sebesar 1% mampu menurunkan jumlah penduduk miskin hingga 0,34%. Dalam hal ini respon penurunan jumlah penduduk miskin lebih kecil dibanding perubahan jumlah orang bekerja sebagai buruh, sehingga dikategorikan inelastic (<1). Sehingga untuk menekan jumlah penduduk miskin sebesar 34% dibutuhkan penambahan jumlah orang yang bekerja sebagai buruh sebesar 100%.

Meski penurunan jumlah penduduk miskin kurang responsive, namun pengaruh penambahan jumlah orang yang bekerja sebagai buruh memberikan nilai yang terbesar dibanding program bantuan social. Artinya dalam kondisi perlambatan ekonomi, upaya pengentasan

kemiskinan di Indonesia tidak hanya dapat ditekan melalui program jaminan social semata, akan tetapi perlu penciptaan lapangan kerja yang dapat membuka peluang penyerapan tenaga kerja yang lebih luas bagi penduduk miskin, yakni pekerjaan sebagai buruh. Jenis pekerjaan tersebut sesuai dengan karakteristik penduduk miskin yang pada umumnya berpendidikan rendah dan *low-skill*. Pilihan bekerja sebagai buruh merupakan salah satu jaminan ekonomi bagi keluarga miskin melalui pendapatan yang didapat secara rutin. Hal ini juga menunjukkan resiko yang dihadapi penduduk miskin dengan bekerja pada suatu institusi atau lembaga akan semakin kecil dibanding jika penduduk miskin membuka usaha sendiri. Namun ditengah perlambatan ekonomi, penciptaan lapangan kerja merupakan salah satu kebijakan yang cukup sulit dipenuhi pemerintah. Oleh karenanya dibutuhkan pembiayaan selain pajak untuk mendorong terciptanya lapangan kerja. Salah satu sumber pembiayaan yang paling cepat didapat namun memiliki konsekuensi di jangka panjang adalah hutang.

Hasil perhitungan elastisitas perubahan jumlah penduduk miskin terhadap perubahan jumlah hutang pemerintah menunjukkan nilai median elastisitas sebesar -0,16. Artinya penambahan hutang pemerintah sebesar 1% dapat menekan jumlah penduduk miskin hingga 0,16%. Nilai tersebut menunjukkan respon penurunan jumlah penduduk miskin yang tidak sebesar penambahan jumlah hutang pemerintah atau dapat dikatakan inelastic. Sehingga untuk menekan jumlah penduduk miskin sebesar 16% dibutuhkan penambahan jumlah hutang pemerintah sebesar 100%. Namun, penambahan hutang dalam jumlah besar memberikan konsekuensi terhadap beban anggaran pemerintah di masa yang akan datang. Oleh karenanya dibutuhkan kebijakan yang tepat dalam memanfaatkan hutang sebagai sumber pembiayaan negara untuk kegiatan-kegiatan ekonomi yang berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan.

Artinya berdasarkan hasil perhitungan elastisitas tersebut menunjukkan bahwa perlu dilakukan perbaikan sistem penanganan pengentasan kemiskinan di Indonesia yang saling sinergi. Dalam hal ini program bantuan social bukan satu-satunya alat yang dapat menekan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Akan tetapi penduduk miskin tersebut juga perlu diberikan lapangan kerja sesuai dengan kemampuannya, seperti pekerjaan buruh. Di tengah perlambatan ekonomi yang dihadapi Indonesia, pemerintah dapat memanfaatkan sumber pembiayaan hutang untuk mendanai kegiatan ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja bagi penduduk miskin.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) terdapat hubungan sangat kuat antara bantuan sosial program JKN-PBI dan Rastra terhadap jumlah penduduk miskin. Program PKH memiliki hubungan kuat dengan jumlah penduduk miskin. Variabel lainnya yang terbukti secara statistic memiliki hubungan dengan jumlah penduduk miskin adalah bekerja sebagai buruh dan hutang pemerintah, (2) Secara statistic terdapat pengaruh negative antara program bantuan social (JKN-PBI,Rastra dan PKH) terhadap jumlah penduduk miskin. Variabel lainnya yang dapat menekan jumlah penduduk miskin yaitu bekerja sebagai buruh dan hutang pemerintah. (3) Hasil perhitungan elastisitas menunjukkan efektifitas bantuan social terhadap penurunan jumlah penduduk miskin paling besar adalah program JKN-PBI (-0,16), kemudian Rastra (-0,15) dan PKH (-0,06). Tambahan lapangan kerja sebagai buruh memiliki tingkat efektifitas yang paling tinggi dibanding program bantuan social dan hutang pemerintah, yakni sebesar (-0,34). Hutang pemerintah dibutuhkan untuk menekan jumlah penduduk miskin sebesar (-0,16).

Saran

Upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan pemerintah dengan mensinergikan program bantuan sosial dan pembukaan lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan rata-rata penduduk miskin. Dalam hal ini program jaminan social melalui jaminan kesehatan (JKN-PBI) perlu ditingkatkan dan terintegrasi dengan program bantuan sosial lainnya (Rastra dan PKH). Di tengah perlambatan ekonomi, pemerintah dapat memanfaatkan sumber pembiayaan melalui hutang, namun penggunaannya diperuntukkan untuk kegiatan produktif dan kegiatan ekonomi yang berdampak langsung penduduk miskin dan rentan miskin. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian selanjutnya berkaitan dengan besaran jumlah hutang optimal yang dinilai aman dalam pembiayaan bantuan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- A Suharyadi, N. K. (2015). *Efektifitas Program Bantuan Sosial dalam Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan*. Jakarta: The Smeru Research Institute.
- Badan Pusat Statistik, B. (2019). *Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan*. Retrieved from www.bps.go.id.
- Bea, B. o. (2018). *Gross Domestic Product: Fourth Quarter and Annual 2017 (third estimate) Corporate Profits: Fourth Quarter and Annual 2017*. www.bea.gov.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2018,). *Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Lapangan Pekerjaan 2008-2017*. Diakses dari www.bps.go.id.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2018). *Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Pengeluaran 2013-2017*. Diakses dari www.bps.go.id.
- Cord, L. (2007). *Delivering on the Promise of Pro-Poor Growth Insight and Lesson from Country Experiences*. Overview Copublication of Palgrave Macmillan and The World Bank.
- Dahmiri, S. d. (2010). Model Permintaan Hutang Luar Negeri Pemerintah dan Dampaknya terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, Volume 12 Nomor 1.
- David M Cutler, a. L. (1991). Macroeconomic Performance and the Disadvantaged. *Brooking Paper on Economic Activity*, Vol 1991 No 2.
- Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. (2018). Alokasi Anggaran Pengentasan Kemiskinan. Retrieved from Portal Data APBN Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset/Details/1016>.
- Fousseni, B. a. (2012). *Impact of Rising World Rice Prices on Poverty and Inequality in Burkina Faso*. CERDI etudes et Documents, E 2012.
- FV Soares, S. S. (2006). Cash Transfer Program in Brazil : Impact on Equality and Poverty. *International Poverty Centre Working Paper No 21*.
- Gertler, P. (2004). *Do Conditional Cash Transfers Improve Child Health? Evidence From Progresa's Control Randomized Experiment*. *American Economic Review*, 94 (2) : 336-341.
- Harris, D. C. (2001). *Evaluating Transfer Programs Within a General Equilibrium Framework*. Washington DC. International Food Policy Research Institute: FCND Discussion Paper, No 110.
- Ita Aristina, M. K. (2017). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Volume 6 No 5.

- Kemenkeu, R. (2017). *Profil Utang dan Penjaminan Pemerintah Pusat*.
www.djppr.kemenkeu.go.id.
- Kemensos, R. (2018). *Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Perlindungan sosial dan Penanganan Kemiskinan*. Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat.
- Laura B Rawlings, a. G. (2005). *Evaluating the Impact of Conditional Cash Transfer Programs*. Oxford University Press. The World Bank Research Observer. Vol. 20 No. 1 .
- P Gertler, M. S. (2005). *Investing Cash Transfers to Raise Long Term Living Standards*. Berkeley CA: University of California.
- Powers, E. T. (1995a). *Growth and Poverty Revisited*. Federal Bank of Cleveland, Economic Commentary.
- Powers, E. T. (1995b). *Inflation, Unemployment and Revisited*. Federal Bank of Cleveland, Economic Commentary.
- Schultz, T. (2004). School Subsidies For The Poor: Evaluating the Mexican PROGRESA Poverty Program. *Journal of Development Economics*, 74, 199-250.
- Septiadi D, H. d. (2016). Dampak Kebijakan Harga Beras dan Luas Areal Irigasi terhadap Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, Volume 4 Nomor 2.
- Sherbaz, J. N. (2016). *Indebtedness and Poverty: The Case of Pakistan*. The Pakistan Development Review.
- Sudarlan. (2015). Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan, dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Eksis, Vol 11 nomor 1*.
- Suharto, E. (2015). Peran Perlindungan Sosial dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia : Studi Kasus Program Keluarga Harapan. *Jurnal Sosiohumaniora Vol 17 No 1*, 22-28.
- Susenas. (2016). *Survei Sosial Ekonomi Nasional: Data Set Survei Rumahtangga Nasional*. Jakarta: Bapan Pusat Statistik.
- Tarabini, A. (2010). Education and Poverty in the Global Development Agenda : Emergence, Evolution and Consolidation. *International Journal of Educational Development*, 204-212, <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijedudev.2009.04.009>.
- Tri, W. d. (2013). Analisis Kemiskinan di Jawa Tengah. *Diponegoro journal of economics*, Volume 2 Nomor 1.
- Worldbank. (2017). *Menuju Sistem Bantuan Sosial yang menyeluruh, terintegrasi dan efektif di Indonesia*. worldbank group.
- Wu, B. D. (2018). The Poverty Reduction of Social Security and Means Tested Transfers. *NBER Working Paper Series*, Working Paper 24567.